



Buntut 220 Toko Modern Ilegal di Badung Gubernur Diminta Bertindak



• DOK NUSABALI

Wakil Ketua DPRD Bali N Sugawa Korry

DENPASAR, NusaBali

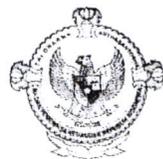
Komisi I DPRD Bali (yang membidangi aparatur negara, perizinan, perundang-undangan) bakal melakukan sidak ke Badung, Rabu (2/9) ini, terkait kasus temuan 220 toko modern ilegal dan 246 titik reklame tanpa izin di Gumi Keris. Selain terjun langsung, Dewan juga minta Gubernur Bali ambil tindakan terhadap kasus di Badung.

Anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Ida Gede Komang Kresna Budi, menyatakan kasus di Bandung terbilang sangat memalukan lembaga pemerintahan. "Apalagi, ada 419 Perbup (Peraturan Bupati) dan 67 Perda (Peraturan Daerah) di Badung yang tidak diklarifikasi ke Gubernur Bali. Ini merupakan pelanggaran hu-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 1



Sambungan - -

Gubernur Diminta Bertindak

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

kum. Lembaga pemerintahan tercoreng oleh kasus ini," ujar Kresna Budi di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (1/9).

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bali ini menyebutkan, selain masalah 419 Perbup dan 67 Perda di Badung yang tanpa melalui proses klarifikasi ke Gubernur, juga terungkap ratusan toko modern ilegal dan titik reklame ilegal di kabupaten terkaya se-Bali tersebut. Semua ini perlu diusut.

"Toko modern yang selama ini ditakutkan mematikan pasar tradisional, kok bisa lolos tanpa izin, dengan jumlah ratusan unit? Kemudian, keberadaan reklame tanpa izin di Badung juga sangat mengkhawatirkan," ujar Kresna Budi yang juga Ketua DPD II Golkar Buleleng versi Agung Laksono.

Komisi I DPRD Bali, kata Kresna Budi, juga menyayangkan adanya penambahan liar di Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung seluas ratusan hektare hingga merusak lingkungan sekitar. "Kami Komisi I DPRD Bali akan turun besok (hari ini) ke Badung. Toko modern ilegal dan penambahan liar di Pantai Pandawa yang dilakukan investor, akan kita telusuri," katanya.

"Jadi, kita back up Gubernur Bali. Kita back up dalam arti pengawasan juga. Apa yang diungkap Gubernur (soal kasus di Badung), harus ada tindak lanjutnya. Apakah ada sanksi atau bagaimana, harus ada finalisasinya. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk."

Menurut Kresna Budi, kasus di Badung ini harus ditindaklanjuti, agar jangan terulang di daerah lain.

"Kita berharap Gubernur Bali bertindak sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur punya kewenangan untuk itu. Kami salut dengan Gubernur yang berani membuka kasus di Badung ini ke publik," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, mengingatkan temuan 67 Perda dan 419 Perbup Badung yang tanpa proses klarifikasi ke Gubernur, sangat memprihatinkan. "Ini sangat memprihatinkan khususnya dalam konteks penyelenggaraan Otonomi Daerah di Bali. Harusnya, produk hukum yang ada diproses dan dibentuk berdasarkan kaidah hukum yang ada," ujar Sugawa Korry saat dikonfirmasi terpisah, Selasa kemarin.

Sugawa Korry menegaskan, dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, seharusnya dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. "Indikasi dan salah satu parameternya, ya ketika menyusun produk hukum itu," tandas Ketua DPD II Golkar Buleleng kubu Aburizal Bakrie ini.

Data mengejutkan soal 67 Perda dan 419 Perbup tanpa melalui proses klarifikasi, serta adanya 220 toko ilegal dan 246 titik reklame ilegal yang dibiarkan tanpa penindakan, sebelumnya disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat melakukan asistensi ke Pemkab Badung di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Senin (31/8).

Gubernur Pastika menyatakan keheranannya dengan pelaksanaan 67 Perda dan 419 Perbup Badung yang tanpa proses klarifikasi ke

provinsi. "Ternyata masih banyak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang belum mendapat tanda klarifikasi dari Gubernur. Selama periode 2010-2015, terdapat 67 Perda dan 419 Perbup di Badung yang belum dapat tanda klarifikasi dari Gubernur. Jadi, selama ini apa dasar saudara bekerja?" ujar Pastika saat memberikan pengarahan kepada para pejabat Pemkab Badung.

Pastika mempertanyakan adanya 220 usaha toko modern ilegal dan 246 titik reklame ilegal yang seharusnya ditertibkan, namun tidak dilakukan Sat Pol PP Badung hingga sekarang. "Saya kaget. Saya ingatkan Penjabat Bupati Badung (Nyoman Harry Yudha Saka) supaya pahami semua itu. Ada 220 toko morden dan 246 titik reklame tanpa izin, tapi tidak ada tindakan," ujar mantan Kapolda Bali ini.

Sementara itu, Gubernur Pastika bersama Tim Asistensi Pemprov Bali akan melanjutkan kegiatan asistensi terhadap Pemkab/Pemkot se-Bali. Menurut Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Ketut Teneng, asistensi ini dilakukan terutama ke daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada 2015 dan kini dipimpin Penjabat Bupati/Walikota, yakni Tabanan, Bangli, Karangasem, dan Denpasar.

"Asistensi akan berlanjut ke setiap kabupaten/kota yang sekarang dipegang Penjabat Bupati/Walikota. Kita melaksanakan asistensi untuk menjaga pelaksanaan pemerintahan di daerah supaya berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Tidak serem sebenarnya, ini fungsinya pengawasan saja," ujar Ketut Teneng yang sekaligus menjadi Koordinator Tim Asistensi Pemprov Bali kepada NusaBali, Selasa kemarin. **nat**



Kasus Pavingisasi Gajah Mada Mulai Disidang



TERDAKWA, Alit Widhiadnyana (tengah) dan Ngurah Kosala Cakrawerthi (kanan) usai sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (1/9). • NUSABALI/YUDA

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi pavingisasi Gajah Mada, Denpasar dengan dua terdakwa, yaitu Alit Widhiadnyana AS (Direktur PT Alit Wirajaya) dan Ngurah Kosala Cakrawerthi (Direktur CV Unika Design) resmi bergulir di Pengadilan Tipikor, Denpasar pada, Selasa (1/9).

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Agus Suraharta disebutkan kasus ini berawal dari penetapan Jalan Gajah Mada, Denpasar sebagai kawasan heritage. Selanjutnya dibangun pedestrian Jalan Gajah Mada dengan anggaran Rp 3,1 miliar. Setelah dilakukan tender, didapat pemenang PT Alit Wirajaya dengan penawaran Rp 2,5 miliar. "PT Alit Wirajaya ditetapkan sebagai pemenang ten-

der," urai JPU dalam dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim pimpinan, Ahmad Peten Sili.

Selain menetapkan pemenang tender PT Alit Wirajaya yang dipimpin Alit Widhiadnyana, juga ditetapkan konsultan pengawas CV Unika Design yang dipimpin ter-

dakwa Ngurah Kosala Cakrawerti dengan nilai kontrak Rp 49,9 juta. Penyelewengan mulai

terjadi saat proyek dilaksanakan.

Pasalnya, dalam pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan perencanaan atau DED (Detail Engineering Design). Di an-

taranya dengan adanya perubahan volume karena tidak dipasangnya paving di atas jembatan Jalan Gajah Mada. "Saat itu dibuat perubahan perjanjian atau addendum, yaitu

perubahan tambah kurang Rp 536 juta," jelas JPU dalam dakwaan.

Atas pekerjaannya ini PT Alit Wirajaya menerima pembayaran hingga Rp 2,2 miliar lebih. Namun dari hasil audit BPKP Wilayah Bali ditemukan realisasi anggaran negara Rp 2,2 miliar, sementara nilai fisik yang diterima hanya Rp 2 miliar lebih. "Sehingga ada kerugian negara Rp 210.541.795," jelas JPU.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana pasal 2 ayat 2 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 jo pasal 55 ayat 1 KHUP, subsidernya diancam pasal 3 UU yang sama. Usai sidang, penasihat hukum kedua terdakwa, yaitu Gede Wija menyatakan akan melakukan eksepsi (keberatan atas dakwaan) dalam sidang berikutnya. **rez**

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 5



PD Pasar Akan Kelola Eks Tiara Grosir

Desain gambar dan maket sudah siap, tinggal tunggu investor. Targetnya, akhir tahun ini ada investor yang siap membangun gedung 4 lantai di lahan eks Tiara Grosir.



LAHAN eks Tiara Grosir di Jalan Cokroaminoto Denpasar Barat, bakal dikelola oleh PD Pasar Kota Denpasar untuk pusat UMKM. • DOK NUSABALI

DENPASAR, NusaBali
Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Denpasar akan mengambilalih pengelolaan lahan eks Tiara Grosir yang berlokasi di Jalan Cokroaminoto Denpasar Barat. Pengelolaan ini berdasarkan SK Walikota No 188.45/1236/HK/2014 tentang Penetapan Penggunaan Tanah HPL No 1 Pemecutan Kaja, tertanggal 19

Desember 2014, menetapkan PD Pasar diberikan hak untuk mengelolanya. Setelah SK tersebut dikantongi PD Pasar, langsung ditindaklanjuti den-

gan membuat desain gambar bangunan.

"Rancangan yang disetujui bangunan dengan lantai 4 ditambah basement," ucap Dirut

PD Pasar I Made Westra saat dikonfirmasi, Selasa (1/9).

Dikatakan Westra, feasibility study (FS) terkait dengan pemanfaatan lahan itu bekerjasama dengan Universitas Udayana (Unud). Bukan hanya FS yang sudah rampung, maket gambarnya juga sudah ada. "Dari tiga rekanan yang diberikan untuk membuat gambar, telah disetujui satu gambar yang sesuai dengan konsep Kota Denpasar," ungkapnya.

Gedung yang ada akan dibuat senyaman mungkin untuk kegiatan UKM, pasar tradisional yang segar dan bersih. Pola penggunaannya tetap seperti rancangan semula, yakni UMKM.

Dikatakan, untuk lantai 4 akan digunakan untuk parkir kendaraan, kemudian di lantai 3 diperuntukkan sebagian parkir, perkantoran, serta ruang administrasi. Lantai 2 khusus untuk areal UKM, lantai 1 pasar modern dan lantai basement digunakan untuk pasar tradisional yang segar

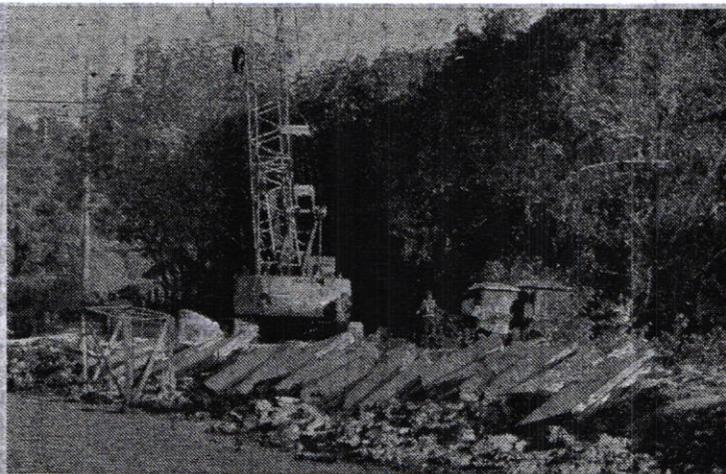
dan bersih. Setelah semuanya rampung, kini pihaknya tinggal mencari investor yang siap untuk membangun gedung tersebut. Karena pola yang digunakan nanti adalah kerja sama, sebagaimana yang dilakukan terhadap pengelolaan Pertokoan Lokitasari, Jalan Thamrin. "Kami targetkan akhir tahun ini sudah ada investor yang siap untuk membangun gedung tersebut," harapnya.

Westra mengakui proses untuk mendapatkan SK hak pengelolaan cukup lama, karena proses yang harus dilalui sangat panjang. Karena menyangkut keabsahan dari segi hukum atau legalitas. Seperti diketahui, penutupan operasional Tiara Grosir telah dilakukan pada September 2014 lalu. Pemkot berniat untuk memanfaatkan lahan tersebut karena perpanjangan HGB yang dilayangkan manajemen Tiara Grosir ditolak dan Pemkot berencana mengelola lahan tersebut sebagai sentra UMKM. **n**



Polhut Dinilai Arogan

Warga bersama Kelompok Nelayan Prapat Agung Mangening Patasari menolak penghentian proyek long storage yang bertujuan mencegah banjir di kawasan Kuta.



• NUSABALI/YUDA

MANGUPURA, NusaBali

Penghentian pembangunan long storage di muara Tukad Mati menuai protes dari banyak pihak. Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Bali dinilai arogan karena menghentikan proyek yang sejatinya demi kepentingan publik.

Mantan anggota DPRD Badung I Wayan Puspa Negara mengatakan harusnya yang dilihat dari penataan yang dilakukan oleh Pemkab Badung semata-mata menyelamatkan kawasan pariwisata agar terbebas dari ancaman banjir. Oleh karenanya, ia menilai Polhut tidak memahami hakikat pembangunan untuk kepentingan publik.

"Terhadap penyetapan proyek penataan muara Tukad Mati oleh Polhut Tahura (Taman Hutan Raya) Ngurah Rai, menunjukkan arogansi sektoral yang tidak memahami hakikat pembangunan

PEMBANGUNAN proyek penataan Tukad Mati yang berada di Desa Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, Badung untuk sementara dihentikan, karena belum mendapat izin dari Dinas Kehutanan Provinsi Bali, karena lokasinya masuk dalam taman hutan raya (tahura) zona perlindungan, Senin (31/8).

kepentingan publik dalam penanggulangan banjir di kawasan destinasi pariwisata Kuta," kata pria asal Legian, Kecamatan Kuta, Selasa (1/9).

Menurut dia, Kuta setiap tahun terkena banjir karena muara Tukad Mati tersumbat sedimentasi. Kini kondisi ini sedang ditata oleh Pemkab Badung karena musim hujan sudah dekat. Padahal, proyek itu memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh DPRD dan bupati dalam APBD Badung 2015. "Sangat disayangkan sikap Polhut yang masih hanya melihat pengamanan tahura pada sisi lingkungan semata, tetapi belum mampu mencermati situasi emergency

yang dialami masyarakat Kuta," katanya.

Dari sudut pandang Puspa Negara yang kini sebagai Tenaga Ahli DPRD Badung, itu secara sempit untuk penyelamatan tahura skala kecil, Polhut memang benar. Tetapi tak sebanding dengan tujuan dan upaya penyelamatan masyarakat akan ancaman banjir dan pencorengan wajah destinasi Kuta yang akan menampar wajah bangsa di mata dunia.

"Jadi ini menjadi aneh, Polhut adalah unsur pemerintah, Pemkab Badung unsur pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia unsur pemerintah,



Sambungan - -

mempertontonkan disharmonisasi dan kebobrokan dalam bertindak. Bukankah pemerintah wajib mengayomi dan menjaga wilayah serta masyarakatnya dari berbagai ancaman demi kehidupan yang lebih baik," tandasnya.

Sementara masyarakat sekitar bersama dengan Kelompok Nelayan Prapat Agung Mangening Patasari, menyatakan dengan tegas sikap mereka untuk menolak penghentian proyek yang digawangi oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Badung tersebut. Puluhan warga menggelar aksi di muara Tukad Mati, Selasa kemarin. Masyarakat menuntut agar permasalahan tersebut segera diselesaikan. Sehingga proyek bisa kembali dilanjutkan.

Ketua Kelompok Nelayan Prapat Agung Mangening Patasari I Nyoman Sukra menyatakan, pascapenghentian proyek pembangunan long storage, masyarakat menjadi waswas akan kembali dihantam banjir. "Jika proyek ini tidak dilanjutkan tentunya potensi banjir di Kuta, Legian, Seminyak hingga ke Monang-Maning akan kembali terjadi," katanya.

Dirinya merasa aneh terkait penghentian proyek yang kini dalam proses normalisasi dan penguatan dinding sungai tersebut. Apalagi diketahuinya pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI juga mendukung proses penataan tersebut. "Padahal ini *kan* sudah 50 persen berjalan, kenapa tidak dari awal ditegaskan. Setelah

proyek berjalan di tengah jalan baru distop, ini *kan* semrawut jadinya," katanya lagi.

Kepala Dishut Bali I Gede Nyoman Wiranata belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi lewat telepon, tidak diangkat. Pesan singkat yang dikirim *NusaBali*, hingga berita ini diturunkan, tidak mendapat balasan.

Pembangunan long storage di muara Tukad Mati wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, terpaksa dihentikan sementara pengerjaannya. Disebut-sebut penghentian ini lantaran belum mendapat 'restu' dari Dinas Kehutanan Provinsi Bali, mengingat lokasi proyek (sungai) masuk dalam taman hutan raya (tahura) zona perlindungan yang merupakan hutan mangrove. Kini proyek senilai lebih dari Rp 47 miliar yang didanai oleh APBD Badung tahun 2015 tersebut terancam mangkrak dan kawasan pariwisata Kuta akan kembali dihantui banjir pada saat musim penghujan.

Secara resmi proyek dihentikan sejak Sabtu (29/8) sekitar pukul 11.00 Wita. Saat itu belasan anggota Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Bali datang untuk menghentikan proyek. Bahkan, personel Polhut langsung melakukan penjagaan di lokasi. Hingga berita ini diturunkan belum jelas kapan kepastian proyek dapat kembali dilanjutkan, sebab konon proyek dapat bisa lanjut apabila ada perubahan dari zona perlindungan menjadi zona pemanfaatan. **as**

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 2



Proyek Biogas Terancam Mangkrak

Masalah mencuat, menyusul adanya pengaduan ke Polda Bali terkait proyek ini.

SEMARAPURA, NusaBali

Proyek biogas di Desa Selat, Klungkung terancam mangkrak. Proyek jenis sumber energi terbarukan berbentuk instalasi biogas ini memanfaatkan limbah kotoran ternak untuk sumber bahan bakar.

Dana proyek dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian ESDM Rp 1,42 miliar dan dana

gaku ada kesepakatan penghentian kegiatan, antara KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dengan pemenang tender. Apa alasan dibalik kesepakatan tersebut, Sumarta tidak menjelaskan rinci. "Intinya kedua pihak tidak menginginkan terjadi pelanggaran," jelas pejabat asal Banjar Pagending, Semarapura Kauh ini, Selasa (1/9). Kata Sumatra, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BPMPDP- KB adalah Kabid Pengembangan Kawasan Pedesaan I Made Catur Adnyana. Terkait itu, ia menyatakan akan turun untuk mengetahui kondisi di lapangan. "Apakah proyek itu layak dilanjutkan atau tidak,"

KK tersebut di empat dusun yakni Dusun Tangkedan 15 KK, Gembalan 8 KK, Selat 3 KK dan Apet 10 KK. Ia mengaku tidak pernah menandatangani proposal usulan untuk warga yang mendapatkan bantuan sarana pembuatan biogas. "Katanya kalau untuk DAK, tidak lewat proposal. Sehingga saya tak ada tanda tangan," kata Sudiana. Namun demikian, secara lisan, dia tahu ada warganya yang mendapatkan bantuan pengadaan sarana biogas tersebut. Menurut dia, proyek biogas di masing-masing KK itu belum rampung. "Rata-rata baru sekitar 60 persen," jelasnya. **k17**

pemeliharaan APBD 2015 Rp 100 juta lebih dengan total Rp 1.142.241.300. Dalam perkembangannya, proyek biogas untuk 60 KK ini diduga bermasalah. Masalah mencuat, menyusul adanya pengaduan ke Polda Bali terkait proyek ini. Buntutnya, terjadi pemutusan kontrak oleh pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KUA) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB (BPMPDP - KB) dengan pihak rekanan yang mengerjakan proyek. Akibatnya, proyek terancam mangkrak.

Plt Kepala BPMPD-KB Klungkung I Wayan Sumarta, men-

ujar Kepala Badan Kesbangpolimas Klungkung ini.

Selaku Plt Kepala BPMPD- KB ia akan membuat laporan kepada bupati. Kabid Pengembangan Kawasan Pedesaan - BPMPD-KB I Made Catur Adnyana, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengelak memberi penjelasan. Ia hanya menyatakan akan turun ke bawah untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Bagaimana nanti, apakah masyarakat bisa menerima proyek biogas ini," kata dia.

Perbekel Selat I Wayan Sudiana menyatakan ada 60 KK warganya mendapatkan bantuan sarana proyek biogas itu.

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 6



Proyek Jembatan Unggahan Terancam Molor

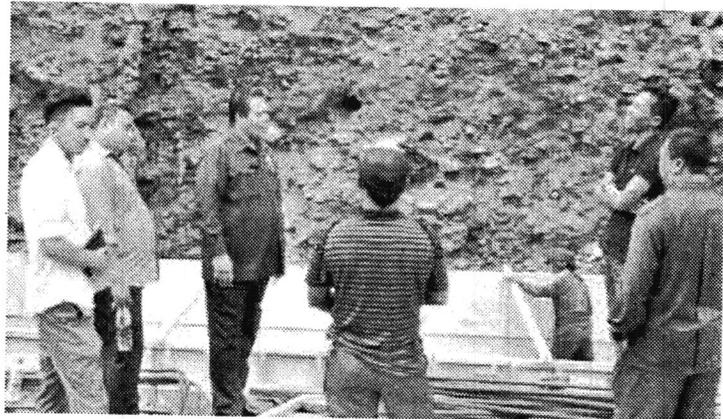
★ Dewan Minta Pengawasan Diperketat

SINGARAJA, NusaBali

Proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan dua desa di Kecamatan Seririt yakni, Desa Ularan dan Desa Unggahan, dikawatirkan tidak rampung tepat waktu. Masalahnya, medan yang cukup berat dan kemungkinan akan turun hujan dapat mengganggu pekerjaan proyek. Celakanya, jumlah tenaga yang dipekerjakan juga sedikit. Komisi II DPRD Buleleng yang turun ke lokasi, Selasa (1/9) langsung meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU), mengawasi ketat pelaksanaan proyek tersebut. Proyek jembatan itu memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun 2015, dengan nilai Rp 1,4 miliar lebih. Jembatan tersebut memiliki panjang 16 meter dengan lebar 6 meter dan ketinggian hampir 3 meter.

Sesuai kontrak kerja, proyek itu sudah dikerjakan sejak Juni 2015 lalu dan akan berakhir hingga tanggal 4 Desember nanti. Komisi II DPRD yang turun dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Putu Mangku Budiasa bersama anggotanya. Saat di lokasi, rombongan komisi II hanya melihat sekitar 20 pekerja di lokasi. Padahal, dengan kondisi medan yang berat, pekerjaan itu harus dikerjakan lebih dari 20 pekerja. "Kami lihat tenaga sedikit, semestinya lebih banyak karena proyek itu berada pada medan yang sangat berat," ungkap Mangku Budiasa.

Dikatakan, pihaknya harus mengawasi proyek tersebut karena proyek itu memakai dana yang cukup besar dari APBD Kabupaten. Sehingga perkembangan dari proyek tersebut dapat diketahui sesuai dengan kontrak kerja. Apalagi lokasi proyek memiliki kesulitan yang tinggi. "Ini kan memakai dana yang cukup besar dari APBD kabupaten, artinya kami juga perlu mengetahui sejauh mana perkembangannya, agar penggunaan



● IST
ROMBONGAN Komisi II DPRD BULEleng saat tinjau pekerjaan proyek pembangunan jembatan penghubung antara Desa Ularan dan Desa Unggahan di Kecamatan Seririt, kemarin.

dana APBD itu bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas," ucap Politisi PDIP asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini.

Mangku Budiasa menyebut, lokasi proyek memiliki medan yang sulit karena posisinya yang curam. Di samping itu, tukad (sungai) yang dibuat jembatan itu masih dialiri air. Sehingga pembuatan konstruksi pondasi jembatan harus memperhitungkan kondisi tersebut. Apalagi musim penghujan tahun ini akan segera tiba. "Kalau ini tidak diantisipasi, tentu ada kekhawatiran air yang mengalir akan mengganggu pekerjaan. Kalau seperti itu, jelas penyelesaian proyek tersebut tidak bisa tepat waktu," ujarnya. Pada kesempatan itu, Komisi II sudah meminta pada pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dinas PU agar mengawasi lebih ketat pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga proyek tersebut bisa diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak kerja.

Sementara pelaksana proyek dari rekanan CV Kabi Karya Permai, Ketut Sudiana mengakui, pihaknya menemui kendala di awal kegiatan, karena po-

sisinya terlalu curam. Disamping itu, pembuatan konstruksi pondasi jembatan juga terganggu akibat aliran air sungai. Namun, pihaknya sudah ambil upaya-upaya sehingga kendala tersebut dapat diatasi. "Memang awalnya agak terganggu dengan kondisi tanah disini, tapi kami sudah ambil langkah ekstra dalam mengatasinya, tapi sekarang sebenarnya sudah tidak ada kendala lagi," terangnya.

Sudiana menyebut, sejak tandatangan kontrak kerja per Juni 2015 lalu, pihaknya sudah langsung bekerja dengan membangun jembatan alternative agar warga dari kedua desa yakni Desa Ularan dan Unggahan bisa lewat. Setelah pembangunan jembatan alternatif rampung, pihaknya melanjutkan kegiatan utama membangun jembatan permanen. Dan saat ini baru tahap pembangunan konstruksi pondasi jembatan sebagai kaki penyangga jembatan utama. Terkait dengan jumlah pekerja, Sudiana menyebut akan melibatkan pekerja lebih banyak lagi. "Kami yakin, proyek ini selesai tepat waktu, tentu kami akan tambah pekerjanya nanti," kata Sudiana. **K19**

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 4



Setiap Tahun, Jumlah Tenaga Kontrak Membengkak

TABANAN, NusaBali

Jumlah pegawai kontrak di SKPD Tabanan setiap tahunnya selalu meningkat. Berdasarkan data tahun 2011 tercatat ada 339 orang tenaga kontrak. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup drastis menjadi 1.213 orang. Pada tahun 2013 membengkak jadi 1.871 orang, tahun 2014 sebanyak 2.248 orang, dan tahun 2015 menggelembung menjadi 2.796 tenaga kontrak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Tabanan, I Made Yasa mengatakan tenaga kontrak paling banyak ada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Sebab banyak sekolah di Kecamatan Pupuan,

Selemedeg, dan Selemedeg Barat membutuhkan guru karena tidak adanya pengangkatan PNS. "Setiap tahun guru banyak yang pensiun, tetapi pengangkatan guru tidak ada. Jadi kita gunakan tenaga kontrak," ujar Yasa, Selasa (1/9).

Ia menjelaskan bahwa tenaga kontrak memiliki masa kontrak selama satu tahun yang setiap tahunnya akan diperpanjang dengan gaji sebesar Rp 1,1 juta per bulan. Selain di bidang pendidikan, jumlah tenaga kontrak tertinggi lainnya di Dinas Kesehatan. Dikatakan tenaga kontrak disebar di puskesmas yang melayani rawat inap. "Dokter juga ada yang berstatus tenaga kontrak, karena

tidak adanya pengangkatan PNS di Kabupaten Tabanan untuk mengisi kekurangan tersebut," tandas Yasa.

Yasa mengatakan, setiap tahun telah mengajukan usulan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Meski jumlah pegawai kontrak meningkat, BKD tidak akan melakukan rasionalisasi terhadap pegawai kontrak di Tabanan. Hanya penempatannya akan dipindah ke posisi yang masih kosong.

"Seperti misalnya tenaga kontrak dari SKPD yang sudah overload kita bawa ke sekolah-sekolah untuk mengisi tata usaha atau guru yang masih banyak kurang," tegas Yasa. **cr55**

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 7